

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Program pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara Nasional di setiap satuan pendidikan, diarahkan pada upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Upaya yang terus menerus dilakukan dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan bermutu dan berkualitas, yang dapat menjamin bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah sesuai harapan dan seharusnya terjadi. Pendidikan merupakan sebuah proses dan sekaligus sistem yang bermuara dan berujung pada pencapaian suatu kualitas manusia tertentu yang dianggap dan diyakini sebagai yang ideal. Berarti pendidikan jelas mempunyai tujuan, adapun tujuan pendidikan nasional menurut UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 adalah:

“Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, estetis, dan demokratis serta memiliki rasa kemasyarakatan dan kebangsaan.”

Untuk mewujudkan itu semua perlu diusahakan terselenggaranya satu sitem pendidikan nasional yang bermutu dan mengingatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Usaha untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tidak pernah berhenti dilaksanakan dan berbagai terobosan baru terus diperkenalkan dan dilakukan oleh pemerintah melalui Diknas, antara lain dalam bidang pengelolaan sekolah, peningkatan sumberdaya tenaga kependidikan, pengembangan materi ajar, pengelolaan penerimaan siswa baru dan lain sebagainya.

Keberlangsungan sebuah Sekolah Menengah Kejuruan tergantung dari animo masyarakat terhadap sekolah tersebut. Apabila animo masyarakat tinggi dengan sendirinya masyarakat akan menyekolahkan di sekolah tersebut sehingga regenerasi sekolah berjalan baik dan terpenuhi kebutuhan kelas untuk terisi siswa baru. Tetapi apabila animo masyarakat rendah terhadap Sekolah Menengah Kejuruan tersebut maka dengan sendirinya rendah pula penyerapan siswa baru disekolah tersebut, karena tidak ada siswa yang mendaftar untuk menjadi siswa baru di sekolah yang bersangkutan. Bila suatu sekolah tidak mendapatkan murid baru atau penyerapan murid dibawah standar maka sekolah tersebut akan mati atau dicabut ijin operasional oleh pemerintah. Ini berarti akan mematikan potensi intelektual masyarakat, dan menimbulkan pengangguran yang tinggi dan hilangnya kesempatan berkembang pad Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam Permendiknas RI Nomor 22 (2006: 20) disebutkan bahwa “Pendidikan Kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan peserta didik

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejurumannya”. Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan terdapat dalam UU Nomor 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Selain itu juga disebutkan dalam PP Nomor 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: “Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu”.

Sementara itu terobosan yang dilakukan dalam upaya pengelolaan penerimaan siswa baru di Sekolah Menengah Kejuruan dan upaya peningkatan sumber daya tenaga kependidikan adalah melalui pelatihan terintegrasi bagi guru, kepala sekolah, dan staf dinas yang didasarkan kepada kompetensi yang harus mereka miliki. Untuk keperluan pelatihan terintegrasi tersebut salah satu materi dasar adalah tentang penerimaan siswa baru. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencapai pendidikan yang bermutu dengan cara memberikan penilaian terhadap sekolah terhadap kemampuan mereka melakukan pengelolaan penerimaan siswa baru. Agar mutu pendidikan sesuai dengan yang seharusnya dan yang diharapkan masyarakat, mungkin perlu kita pertanyakan standar seperti apa yang dapat dijadikan acuan?. Jika standar yang dikehendaki bersifat nasional, maka hendaknya standar tersebut juga harus bersifat nasional pula, baik dari aspek input hingga proses outputnya.

Seharusnya sebuah Sekolah Menengah kejuruan yang ideal adalah yang bisa berkembang terus menerus. Setiap tahun animo masyarakat bertambah sehingga jumlah pendaftar di sekolah tersebut bertambah besar jumlahnya dari tahun ke tahun. Dengan demikian semakin lama sekolah semakin selektif dalam menerima calon siswanya karena besarnya jumlah peminat, maka akan menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas dan sekolah mempunyai kualitas tinggi.

Penerimaan sekolah oleh masyarakat mempunyai pengertian sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas public, alat regulasi diri (*self regulation*) dimana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahannya. Maka hal ini memberikan makna dalam hasil sebagai suatu pengakuan, suatu Sekolah Menengah Kejuruan telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan. Proses pengembangan mutu sekolah dalam upaya meningkatkan mutu dan dalam penerimaan siswa baru harus dilaksanakan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memperdayakan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional serta dapat diterima oleh masyarakat sekitar.

Dalam hal ini yang perlu kita pertanyakan adalah benarkah ukuran penerimaan siswa baru itu sudah standar ?. Benarkah sekolah yang dalam pengelolaan siswa baru itu sudah memenuhi standar minimal dari

ketentuan pengelolaan penerimaan siswa baru di sekolah?. Dan bagaimanakah suatu prosedur pengelolaan penerimaan siswa baru suatu sekolah dilakukan? Sudahkah memenuhi aturan yang seharusnya dilakukan dalam proses pengelolaan penerimaan siswa baru?

Penerimaan siswa baru di sekolah harus diletakkan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan otonomi sekolah. Oleh karena itu di dalam proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari alternatif pengelolaan sekolah. Hal ini mendorong lahirnya konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen ini alternatif ini memberikan kemandirian kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi dalam pencapaian tujuan peningkatan mutu tersebut tetap mengacu pada kebijakan nasional, dan konsekuensi pelaksanaan program ini adalah ada komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu orang tua atau masyarakat, guru, kepala sekolah, siswa, staf lain, serta pemerintah.

Standarisasi pendidikan mempunyai makna sebagai upaya penyamaan antara pendidikan secara nasional yang memiliki keluasaan dan keluwesan dalam mengimplementasikannya. Evaluasi merupakan suatu proses kontinu dalam memperoleh data maupun informasi guna mengambil suatu keputusan. Agar mutu pendidikan sesuai dengan apa yang seharusnya diharapkan oleh masyarakat, maka perlu ada standar yang dijadikan paku (*benchmark*). Dengan menggunakan instrument akreditasi yang komprehensif dan dikembangkan berdasarkan standar mutu yang

ditetapkan diharapkan profil mutu sekolah dapat dipetakan untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam kaitannya dengan standar pendidikan, pengelolaan penerimaan siswa baru di sekolah menjadi salah satu bagian yang penting dalam upaya memperoleh informasi tentang kondisi nyata suatu sekolah berdasarkan standar minimal yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilaksanakan pengembangan sekolah secara adil dan merata baik untuk sekolah negeri maupun swasta (Anonim, 2005).

Ada dua fokus dalam penilaian kualitas sekolah dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah yang dilihat oleh masyarakat, yaitu pertama, kelayakan dapat dilihat dari berbagai sumberdaya, sarana dan prasarana yang dimiliki, dan kedua, kinerja dapat dilihat dari proses dan hasil pendidikan yang dicapai sekolah yang bersangkutan. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu orang tua atau masyarakat, guru, kepala sekolah, siswa dan staf lainnya, serta pemerintah dalam pencapaian tujuan peningkatan mutu. Dalam pelaksanaannya strategi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah antara lain meliputi evaluasi diri (*self evaluation*) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan sekolah. Dalam evaluasi tersebut sekolah bersama - sama orangtua dan masyarakat menentukan visi dan misi sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan atau merumuskan mutu yang diharapkan dan dilanjutkan dengan

menyusun rencana program sekolah termasuk pembiayaan dengan mengacu kepada skala prioritas dan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi sekolah dan sumber daya yang tersedia.

Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas (*Quality Assurance*) dan pemberdayaan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Artinya pihak yang dievaluasi, apakah itu administrator pendidikan, kepala sekolah, guru, atau siswa akan merasakan bahwa kegiatan evaluasi membantu untuk mengenal berbagai kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan arah yang jelas dilakukan untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu evaluasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan, komprehensif, dan transparan serta memotivasi peserta didik dan pengelolaan pendidikan untuk terus menerus untuk berupaya meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran dan pendidikan.

Proses penerimaan siswa baru harus dilaksanakan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memperdayakan lembaga pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses pengelolaan penerimaan dilakukan dengan melakukan pendekatan secara emosional dengan masyarakat dan selanjutnya dilakukan upaya promosi yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan selalu mengikuti perkembangan perubahan.

Upaya sekolah dalam melakukan pengelolaan dalam penerimaan siswa baru di sekolah harus diletakkan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan otonomi sekolah. Oleh karena itu didalam proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari alternative pengelolaan sekolah. Hal ini mendorong lahirnya konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Akuntabilitas lembaga penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah dapat diketahui dari peringkat akreditasi yang dimiliki sekolah, hal ini sesuai dengan ayat 2 pasal 60 UU Nomer 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Peringkat akreditasi tersebut adalah akreditasi harus benar - benar menggambarkan kualitas sekolah sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang jelas tentang kualitas sekolah. Sehingga masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya dapat mengetahui standar kualitas sekolah yang diinginkan. Mengingat pentingnya pengelolaan penerimaan siswa baru baik bagi sekolah maupun masyarakat, perlu dilakukan studi tentang pengembangan model pengelolaan penerimaan siswa baru bagi sekolah SMK.

Dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut, maka penulis akan mencoba mengambil judul “Pengelolaan penerimaan Siswa Baru di SMK IPTEK Weru Sukoharjo.”



## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian sebagaimana yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian maka fokus penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan pengelolaan penerimaan siswa baru di SMK IPTEK Weru Sukoharjo. Fokus penelitian ini kemudian dirinci pada dua sub fokus.

1. Ciri-ciri desain pengelolaan penerimaan siswa baru di SMK IPTEK Weru Sukoharjo.
2. Ciri-ciri strategi pengelolaan penerimaan siswa baru di SMK IPTEK Weru Sukoharjo.

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap peneliti mempunyai tujuan atau sasaran yang akan dijadikan sebagai pedoman agar penelitian tersebut dapat sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yakni berupa tujuan penelitian. Ada dua tujuan dalam penelitian ini.

1. Mendeskripsikan ciri-ciri desain pengelolaan penerimaan siswa baru di SMK IPTEK Weru.
2. Mendiskripsikan ciri-ciri strategi pengelolaan penerimaan siswa baru di SMK IPTEK Weru Sukoharjo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian diharapkan menghasilkan suatu manfaat. Manfaat penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktisi.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian, khususnya pada SMK IPTEK Weru Sukoharjo pada khususnya dan pada umumnya semua Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Memberikan sumbangan wawasan bagi peneliti selanjutnya pada program pasca sarjana magister manajemen pendidikan UMS.
- c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dan mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian survey mengenai pengelolaan penerimaan siswa baru.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bahan masukan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menganalisa tentang pengelolaan penerimaan siswa baru di SMK IPTEK Weru Sukoharjo dan Sekolah Menengah Kejuruan pada umumnya.

- c. Bagi masyarakat luas tentang pengelolaan penerimaan siswa baru, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan sekolah yang menjadi pilihan keluarga.

## **E. Daftar Istilah**

Ada beberapa istilah yang penulis pergunakan dalam penelitian ini.

### **1. Pengelolaan Penerimaan siswa baru**

Pengelolaan penerimaan siswa baru adalah suatu usaha untuk mengatur (memenej, mengendalikan) dan mendapatkan siswa baru dalam kelanjutan aktifitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran secara efektif, efisien dan produktif.

### **2. Siswa baru**

Siswa baru adalah komponen utama yang dibutuhkan dalam kelangsungan proses belajar mengajar yang ada di sekolah dan sebagai bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan keberhasilan dalam pengelolaan penerimaan siswa baru. Besar kecilnya animo masyarakat dalam menentukan pilihan dalam menyekolahkan keluarganya dalam suatu serkolah sangat bergantung dari pengelolaan penerimaan siswa baru dan mutu sekolah tersebut.